

**DINASTI POLITIK RKH FUAD AMIN DALAM MEMPERTAHANKAN
KEKUASAANNYA PERIODE TAHUN 2003-2013 DI KABUPATEN
BANGKALAN JAWA TIMUR**

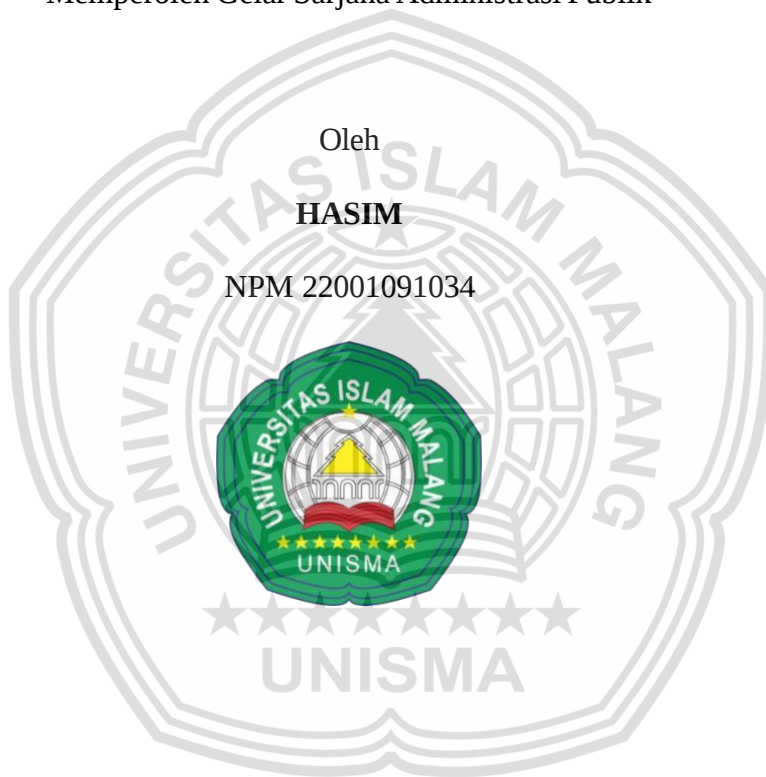
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

HASIM

NPM 22001091034



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2026**

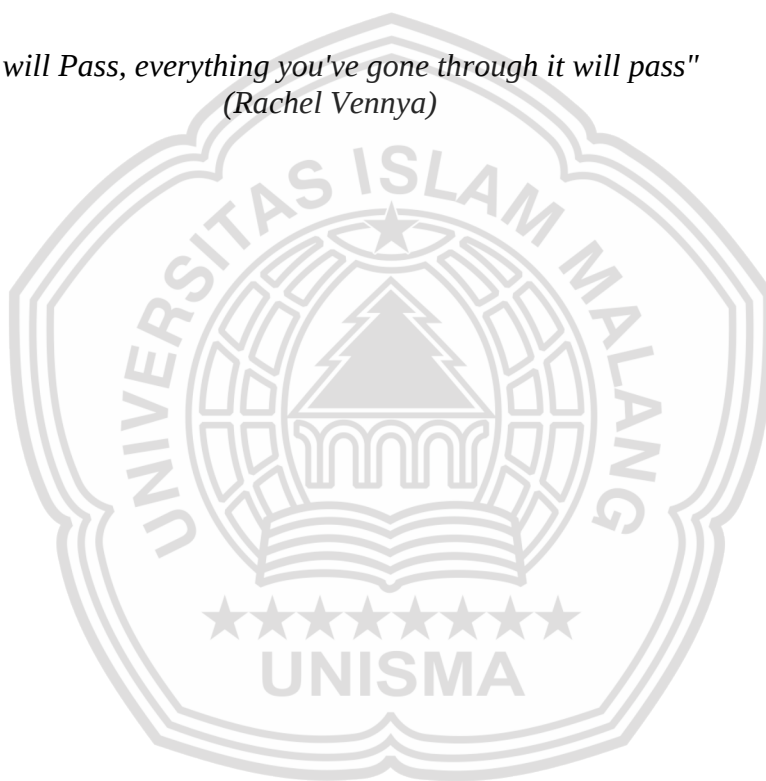


MOTTO

"Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan"
(Nadin Amizah)

*"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
(QS.Al-Insyirah :5-6)*

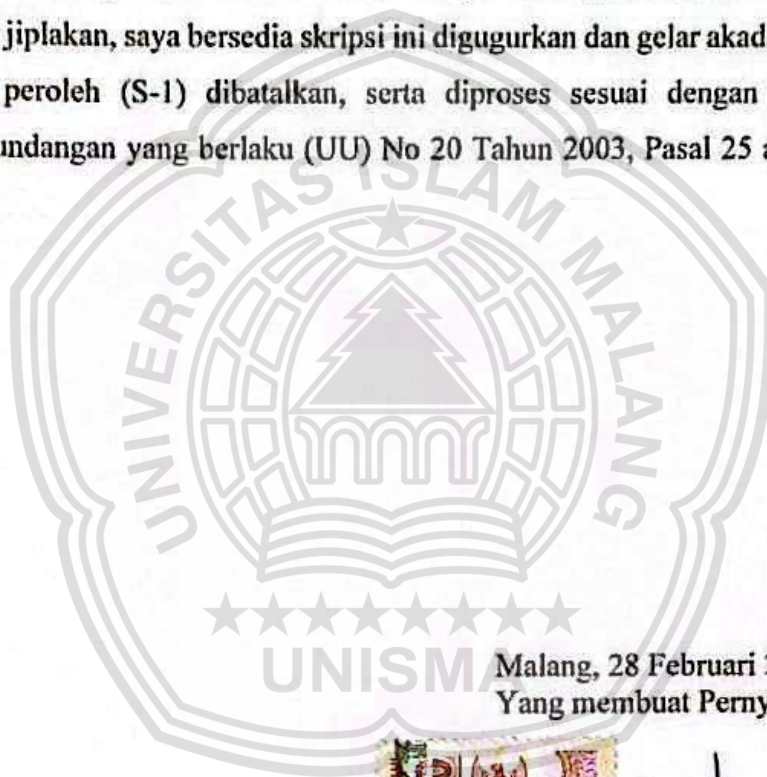
"It will Pass, everything you've gone through it will pass"
(Rachel Vennya)



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya didalamnya tidak terdapat sebagian atau keseluruhan pendapat atau pemikiran orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat, tanpa menyebutkan sumber dari orang lain tersebut.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



Malang, 28 Februari 2026
Yang membuat Pernyataan



Hasim

22001091034

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul

**DINASTI POLITIK RKH FUAD AMIN DALAM MEMPERTAHANKAN
KEKUASAANNYA PREODE TAHUN 2003 – 2013 DI KABUPATEN
BANGKALAN JAWA TIMUR**

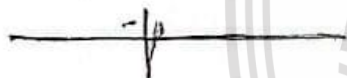
Telah disetujui untuk di ujikan di hadapan majelis penguj

Malang, 28 Februari 2026

Komisi pembimbing

Pembimbing utama

Pembimbing pendamping



Dr. Khoiron, S.AP, M.IP
NPP : 120106198332195



Retno Wulan Sekarsari, S.AP, M.AP
NPP : 152312198832234

★ Mengetahui, ★

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP M.AP
NPP : 191605199232105

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul
**DINASTI POLITIK RKH FUAD AMIN DALAM MEMPERTAHANKAN
KEKUASAANNYA PERIODE TAHUN 2003-2013 DI KABUPATEN
BANGKALAN JAWA TIMUR**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

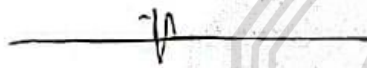
LULUS

Malang, 30 maret 2026

Majelis Penguji

Ketua Penguji

Anggota Penguji 1


(Dr. Khoiron, S.AP., M.IP)
NPP. 120106198332195


(Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol., Sc)
NPP. 152312198832234
Anggota Penguji 2


(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si)
NPP. 21515061976321004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi


(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si)
NPP. 21515061976321004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Dinasti Politik RKH Fuad Amin dalam Mempertahankan Kekuasaannya Periode tahun 2003-2013 di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur ”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mat Raji dan Ibu Hamilah, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta pengorbanan yang tidak ternilai.
2. Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Malang.
3. Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
4. Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP., selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang.
5. Dr. Khoiron, S.AP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi.
6. Retno Wulan Sekarsari, S.AP.,M.AP.,M.Pol.,Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, koreksi, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan akademik selama masa perkuliahan.
8. Anisa Putri Damayanti, S.AP., yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta menemani dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan, Atokillah (calon S.H.) dan Ainul Muzammil, S.AP., atas kebersamaan, dukungan, serta semangat selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Administrasi Publik.

Malang, 27 Februari 2026

Penulis

Hasim
22001091034

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hasim adalah penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Mat Raji dan Ibu Hamilah. Pendidikan formal penulis dimulai di SDN Kelbung 1, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sepulu. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah atas di MA Nurul Cholil.

Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Malang pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, di antaranya sebagai anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Administrasi pada tahun 2023. Selain aktif di organisasi intra kampus, penulis juga terlibat dalam organisasi daerah Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IMABA) Distrik Universitas Islam Malang dan Malang Raya sebagai sarana pengembangan diri, perluasan jaringan, serta penguatan solidaritas kedaerahan. Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi akademik dan praktis di bidang administrasi publik, penulis juga melaksanakan kegiatan magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman dalam memahami proses pelayanan administrasi kependudukan serta praktik penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pemerintahan. Keseluruhan pengalaman tersebut menjadi bekal bagi penulis dalam mengembangkan kapasitas akademik, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap isu-isu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.



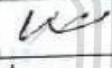
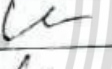
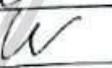
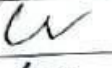
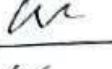
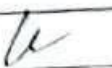
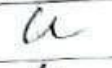
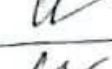
UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA) FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI TERAKREDITASI

Program Studi : 1. Ilmu Administrasi Publik 2. Ilmu Administrasi Bisnis

Jember 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 565802 ext 127 Faks. 0341 552249 Email: library@unisma.ac.id Website: <http://ia.unisma.ac.id>

KARTU KONSULTASI

Nama : Hasim
NPM : 22001091034
Program Studi : Adminitrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Judul : Dinasti Politik RKH Fuad Amin dalam Mempertahankan
Kekuasaannya Periode tahun 2003-2013 di Kabupaten Bangkalan
Jawa Timur

No	Tanggal	Keterangan Kegiatan	Tanda Tangan
1.	14 Mei 2024	Konsultasi Judul	
2.	18 Mei 2024	Konsultasi Judul	
3.	1 Juni 2024	Konsultasi Judul	
4.	22 Juni 2024	ACC Judul	
5.	6 Juli 2024	Memaparkan kasus yang akan diteliti	
6.	13 Juli 2024	Revisi BAB I	
7.	19 Agustus 2024	Revisi BAB I	
8.	31 Agustus 2024	Revisi BAB II	
9.	7 September 2024	Revisi BAB II	
10.	23 Januari 2025	Revisi BAB II, III	
11.	8 Februari 2025	ACC Proposal Skripsi	
12.	24 Januari 2026	Konsultasi dan Izin Penelitian	
13.	31 Januari 2026	Bimbingan IV, V, IV	
14.	7 Februari 2026	Bimbingan IV, V, IV	
15.	14 Februari 2026	Bimbingan IV, V, IV	
16.	21 Februari 2026	Bimbingan IV, V, IV	
17.	28 Februari 2026	ACC Sidang Skripsi	



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
(U N I S M A)
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
TERAKREDITASI**

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Publik 2. Ilmu Administrasi Bisnis

Jatayuono 193 Malang, 68114 Telp. (0341) 565802 Fax (0341) 572284 Email: fa.unisma.ac.id Website: <http://fa.unisma.ac.id>

Malang, 28 Februari 2026
Dosen Pembimbing I

Dr. Khoiron, S.AP, M.I.P
NPP : 120106198332195





UNIVERSITAS ISLAM MALANG
(U N I S M A)
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
TERAKREDITASI

Program Studi : 1. Ilmu Administrasi Publik 2. Ilmu Administrasi Bisnis

Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 565802, ext 127 Faks. 0341 552249 Email: fia@unisma.ac.id Website: http://fia.unisma.ac.id

KARTU KONSULTASI

Nama : Hasim
NPM : 22001091034
Program Studi : Adminitrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Judul : Dinasti Politik RKH Fuad Amin dalam Mempertahankan
Kekuasaannya Periode tahun 2003-2013 di Kabupaten Bangkalan
Jawa Timur

No	Tanggal	Keterangan Kegiatan	Tanda Tangan
1.	14 Mei 2024	Konsultasi Judul	
2.	6 Juni 2024	Revisi BAB I	
3.	17 Juli 2024	Revisi BAB II	
4.	22 Agustus 2024	Revisi BAB II	
5.	3 Januari 2025	Revisi BAB III	
6.	9 Februari 2025	ACC Sempro	
7.	10 November 2025	Konsultasi Penelitian	
8.	5 Januari 2026	Revisi BAB IV, V, VI	
9.	12 Januari 2026	Revisi BAB IV, V, VI	
10.	27 Januari 2026	Revisi BAB IV, V, VI	
11.	2 Februari 2026	Revisi BAB IV, V, VI	
12.	5 Februari 2026	Revisi BAB IV, V, VI	
13.	11 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 11 Februari 2026
Dosen Pembimbing II



Retno Wulan Sekarsari, S.AP, M.AP
NPP : 15231219882234

RINGKASAN

Hasim, 2026. Dinasti Politik RKH Fuad Amin dalam Mempertahankan Kekuasaannya Periode tahun 2003-2013 di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. Khoiron, S.AP., M.IP. dan Retno Wulan Sekarsari, S.AP.,M.AP.,M.Pol.,Sc. 19156 kata, 103 halaman, xv halaman romawi.

Fenomena dinasti politik merupakan salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang membuka ruang bagi elit daerah untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan berbasis jaringan keluarga. Di Kabupaten Bangkalan, kekuasaan keluarga Fuad Amin berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan tetap memiliki pengaruh politik yang kuat meskipun menghadapi persoalan hukum dan kritik publik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dinasti politik Fuad Amin mampu mempertahankan kekuasaannya dalam sistem pemerintahan daerah serta bagaimana masyarakat memandang keberlanjutan kepemimpinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bangkalan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitan dengan fenomena dinasti politik. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian menggunakan perspektif Harold D. Lasswell, yaitu *who gets what, when, and how*, untuk memahami aktor utama, distribusi kekuasaan dan sumber daya, strategi mempertahankan kekuasaan, serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan dinasti politik Fuad Amin dipengaruhi oleh dominasi figur sentral yang mengendalikan jaringan kekuasaan hingga tingkat lokal, reproduksi elite dalam lingkaran yang relatif tetap, serta strategi politik berupa penguatan hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat, distribusi sumber daya kepada kelompok pendukung, dan pembangunan fisik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi tersebut membentuk legitimasi sosial yang memungkinkan dinasti mempertahankan pengaruh politiknya dalam jangka panjang. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan dinasti politik tidak hanya ditentukan oleh hubungan kekerabatan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola jaringan kekuasaan, membangun legitimasi sosial melalui kinerja pembangunan, serta menyesuaikan strategi politik dengan karakter sosial masyarakat lokal. Namun demikian, keberadaan dinasti politik juga berdampak pada terbatasnya kompetisi politik, kecenderungan partisipasi masyarakat yang pragmatis, serta potensi melemahnya akuntabilitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pemerintahan, transparansi kebijakan, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat menjadi penting untuk menjaga kualitas demokrasi.

Kata Kunci: Dinasti Politik; Otonomi Daerah; Kekuasaan Lokal; Legitimasi Politik; Pemerintahan Daerah.

SUMMARY

Hasim, 2026. The Political Dynasty of RKH Fuad Amin in Sustaining Political Power (2003–2013) in Bangkalan Regency, East Java, Indonesia. Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Science, Universitas Islam Malang. Advisors: Dr. Khoiron, S.AP., M.IP. and Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol., Sc. 19156 words, 103 page, xv roman pages.

Political dynasty is one of the consequences of regional autonomy that provides opportunities for local elites to build and maintain power through family-based political networks. In Bangkalan Regency, the political dominance of Fuad Amin's family has persisted for nearly two decades and continues to influence local politics despite legal issues and public criticism. This condition raises questions regarding how the Fuad Amin political dynasty has been able to sustain its power and how society perceives the continuity of such leadership within the local government system.

This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. The study was conducted in Bangkalan Regency using data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively based on their relevance to the political dynasty phenomenon. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing. The study applies Harold D. Lasswell's perspective of *who gets what, when, and how* to analyze key actors, power distribution, strategies of power maintenance, and their implications for local governance.

The findings indicate that the sustainability of the Fuad Amin political dynasty is influenced by the dominance of a central political figure who controls extensive power networks at the local level, the reproduction of elites within a relatively stable inner circle, and political strategies such as strengthening relations with religious leaders and local communities, distributing resources to loyal supporters, and implementing visible physical development. These factors generate social legitimacy that enables the dynasty to maintain long-term political influence. It can be concluded that the persistence of the political dynasty is not solely determined by kinship ties, but also by the ability to manage power networks, build legitimacy through development performance, and adapt political strategies to the local socio-cultural context. However, the dynasty also contributes to limited political competition, pragmatic political participation, and potential weakening of accountability in local governance.

Keywords: Political Dynasty; Regional Autonomy; Local Power; Political Legitimacy; Regional Government.



RINGKASAN

Hasim, 2026. Dinasti Politik RKH Fuad Amin dalam Mempertahankan Kekuasaannya Periode tahun 2003-2013 di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. Khoiron, S.AP., M.IP. dan Retno Wulan Sekarsari, S.AP.,M.AP.,M.Pol.,Sc. 19156 kata, 103 halaman, xv halaman romawi.

Fenomena dinasti politik merupakan salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang membuka ruang bagi elit daerah untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan berbasis jaringan keluarga. Di Kabupaten Bangkalan, kekuasaan keluarga Fuad Amin berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan tetap memiliki pengaruh politik yang kuat meskipun menghadapi persoalan hukum dan kritik publik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dinasti politik Fuad Amin mampu mempertahankan kekuasaannya dalam sistem pemerintahan daerah serta bagaimana masyarakat memandang keberlanjutan kepemimpinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bangkalan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitan dengan fenomena dinasti politik. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian menggunakan perspektif Harold D. Lasswell, yaitu *who gets what, when, and how*, untuk memahami aktor utama, distribusi kekuasaan dan sumber daya, strategi mempertahankan kekuasaan, serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan dinasti politik Fuad Amin dipengaruhi oleh dominasi figur sentral yang mengendalikan jaringan kekuasaan hingga tingkat lokal, reproduksi elite dalam lingkaran yang relatif tetap, serta strategi politik berupa penguatan hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat, distribusi sumber daya kepada kelompok pendukung, dan pembangunan fisik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi tersebut membentuk legitimasi sosial yang memungkinkan dinasti mempertahankan pengaruh politiknya dalam jangka panjang. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan dinasti politik tidak hanya ditentukan oleh hubungan kekerabatan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola jaringan kekuasaan, membangun legitimasi sosial melalui kinerja pembangunan, serta menyesuaikan strategi politik dengan karakter sosial masyarakat lokal. Namun demikian, keberadaan dinasti politik juga berdampak pada terbatasnya kompetisi politik, kecenderungan partisipasi masyarakat yang pragmatis, serta potensi melemahnya akuntabilitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pemerintahan, transparansi kebijakan, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat menjadi penting untuk menjaga kualitas demokrasi.

Kata Kunci: Dinasti Politik; Otonomi Daerah; Kekuasaan Lokal; Legitimasi Politik; Pemerintahan Daerah.

SUMMARY

Hasim, 2026. The Political Dynasty of RKH Fuad Amin in Sustaining Political Power (2003–2013) in Bangkalan Regency, East Java, Indonesia. Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Science, Universitas Islam Malang. Advisors: Dr. Khoiron, S.AP., M.IP. and Retno Wulan Sekarsari, S.AP.,M.AP.,M.Pol.,Sc. 19156 words, 103 page, xv roman pages.

Political dynasty is one of the consequences of regional autonomy that provides opportunities for local elites to build and maintain power through family-based political networks. In Bangkalan Regency, the political dominance of Fuad Amin's family has persisted for nearly two decades and continues to influence local politics despite legal issues and public criticism. This condition raises questions regarding how the Fuad Amin political dynasty has been able to sustain its power and how society perceives the continuity of such leadership within the local government system.

This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. The study was conducted in Bangkalan Regency using data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively based on their relevance to the political dynasty phenomenon. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing. The study applies Harold D. Lasswell's perspective of *who gets what, when, and how* to analyze key actors, power distribution, strategies of power maintenance, and their implications for local governance. The findings indicate that the sustainability of the Fuad Amin political dynasty is influenced by the dominance of a central political figure who controls extensive power networks at the local level, the reproduction of elites within a relatively stable inner circle, and political strategies such as strengthening relations with religious leaders and local communities, distributing resources to loyal supporters, and implementing visible physical development. These factors generate social legitimacy that enables the dynasty to maintain long-term political influence. It can be concluded that the persistence of the political dynasty is not solely determined by kinship ties, but also by the ability to manage power networks, build legitimacy through development performance, and adapt political strategies to the local socio- cultural context. However, the dynasty also contributes to limited political competition, pragmatic political participation, and potential weakening of accountability in local governance.

Keywords: Political Dynasty; Regional Autonomy; Local Power; Political Legitimacy; Regional Government

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Syafiie (2011; 53), ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk membagi wilayah Indonesia ke dalam daerah-daerah yang memiliki susunan pemerintahan sendiri melalui undang-undang.

Dalam Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, kemudian provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dan tetap berada dalam kerangka NKRI. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat koordinatif, sementara susunan dan tata kerja pemerintahan daerah diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Bunyi Pasal 18 UUD 1945 sebagai berikut:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah. (2) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan dengan pemerintah pusat dalam hubungan kerja yang bersifat koordinatif, serta dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. (4) Susunan dan tata kerja pemerintah daerah diatur dengan undang-undang.

Selain itu, Pasal 18A UUD 1945 mengatur bahwa pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi, tata kelola, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pembentukan daerah baru juga harus memperhatikan kesatuan wilayah, budaya, dan administrasi pemerintahan. Pasal 18A UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dibentuk berdasarkan pertimbangan tata kelola, kemampuan ekonomi, dan kultural. (2) Dalam hal pembentukan daerah otonom baru, harus memperhatikan kesatuan wilayah, budaya, dan administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Pasal 18B UUD 1945 memberikan hak kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan membentuk peraturan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18B UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam upaya melaksanakan desentralisasi, daerah memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintah pusat. (2) Pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan.

Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah, termasuk mengenai pembagian kewenangan, struktur pemerintahan, dan mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya. Adapun desentralisasi diartikan sebagai penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pada dasarnya, kebijakan otonomi daerah dibuat untuk mengurangi dominasi pemerintah pusat. Kewenangan yang sebelumnya terpusat dialihkan kepada pemerintah daerah sehingga terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan demikian, daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih luas untuk menentukan arah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan tersebut semakin terlihat setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama melalui penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini pada awalnya diharapkan mampu memperkuat demokrasi dan mengurangi dominasi pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah justru memunculkan dinamika baru yang tidak selalu sejalan dengan tujuan awalnya.

Menurut Syafiie (2011; 57) desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi ternyata juga menimbulkan dampak lain, salah satunya adalah munculnya dinasti politik di tingkat lokal.

Robison (2012; 76) berpendapat bahwa desentralisasi yang semula diharapkan mampu melemahkan oligarki peninggalan Orde Baru justru melahirkan elite-elite baru di daerah. Elite politik lokal memanfaatkan kewenangan yang

dimiliki untuk membangun kekuasaan politik dan ekonomi baru. Kondisi ini melahirkan figur-figur yang sering disebut sebagai “Soeharto kecil” di daerah. Dengan kata lain, desentralisasi tidak selalu menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis, tetapi justru dapat memperkuat kekuasaan yang terpusat pada kelompok tertentu dalam lingkup lokal.

Dinasti politik sendiri dapat dipahami sebagai pola kekuasaan yang diwariskan atau dilanjutkan oleh anggota keluarga dari pemimpin sebelumnya. Fenomena ini cukup sering ditemukan di Indonesia, ditandai dengan terpilihnya kandidat yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang sedang atau pernah berkuasa. Jainuri (2014; 20) menyebutkan bahwa praktik dinasti politik bertentangan dengan prinsip negara demokrasi karena berpotensi merusak nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan berpendapat, penegakan hukum, serta mendorong lahirnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Yatim (1997; 19) juga menjelaskan bahwa dinasti politik mempersempit peluang masyarakat lain untuk ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terjadi karena kandidat yang berasal dari keluarga penguasa umumnya memiliki dukungan politik dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan kandidat lain.

Walaupun demikian, praktik dinasti politik tidak dilarang secara hukum di Indonesia. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Ketentuan yang pernah melarang praktik dinasti politik, yakni Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian dibatalkan

oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Fenomena dinasti politik tidak hanya terjadi di Indonesia. Penelitian Farida Jalalzai dan Meg Rincker pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar satu dari sepuluh pemimpin dunia berasal dari keluarga yang sebelumnya telah terlibat dalam politik. The Guardian pada November 2023 juga menuliskan bahwa kekuasaan dinasti semakin menguat di sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Kamboja, Thailand, Filipina, dan Indonesia. (Editorial, 2023 dalam [theguardian.com](https://www.theguardian.com)).

Di Kamboja, Hun Sen yang telah berkuasa selama puluhan tahun menyerahkan jabatan perdana menteri kepada putranya, Hun Manet. Di Thailand, keluarga Shinawatra tetap memiliki pengaruh besar dalam politik nasional melalui Thaksin Shinawatra, Yingluck Shinawatra, hingga Paetongtarn Shinawatra. Sementara di Filipina, kekuasaan politik juga didominasi oleh keluarga besar seperti Marcos, Aquino, dan Duterte.

Indonesia bahkan disebut dalam media *The Guardian* sebagai salah satu contoh paling menonjol. Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo dipandang sebagai simbol perubahan terhadap praktik politik lama yang sarat korupsi dan nepotisme. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, putranya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri.

Pada tingkat daerah, praktik dinasti politik juga banyak ditemukan. Dona (2022; 134) menyebutkan di Provinsi Banten, misalnya, keluarga Ratu Atut

Chosiyah membangun jaringan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga pada berbagai jabatan strategis, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Kekuasaan tersebut melibatkan suami, saudara, anak, hingga cucu. Penelitian Mawardi (2021; 51) menyebutkan Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor melalui dinasti politik Ade Yasin. Kekuasaan di daerah tersebut bergerak dalam lingkaran keluarga, mulai dari kakek, ayah, hingga saudara kandung yang saling mendukung untuk memperoleh dan mempertahankan jabatan politik. Imam (2022; 37) menyebutkan di Kota Subulussalam, dinasti politik terlihat dari adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam satu keluarga. H. Affan Alfian Bintang menjabat sebagai wali kota, sedangkan anaknya, Ade Fadly, menjadi Ketua DPRK. Tidak hanya itu, anak lainnya, Kiki Bintang, juga menjadi anggota DPRK dari daerah pemilihan yang berbeda.

Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah pascareformasi membuka peluang yang besar bagi tumbuhnya dinasti politik di daerah. Salah satu dinasti politik yang cukup menonjol terdapat di Kabupaten Bangkalan, yaitu dinasti Fuad. Dinasti ini mampu menguasai pemerintahan Bangkalan selama kurang lebih dua puluh tahun atau empat periode pemilihan.

Fuad Amin Imron mulai berkuasa setelah terpilih sebagai Bupati Bangkalan pada tahun 2003. Berbeda dengan banyak elite daerah lainnya, Fuad Amin bukan berasal dari jaringan Orde Baru. Ia merupakan keturunan KH. Moch. Kholil dan putra dari R. KH. Amin Imron, seorang politisi PPP yang dikenal menentang rezim Orde Baru. Selain dikenal sebagai tokoh agama, Fuad Amin juga memiliki usaha di bidang layanan haji dan penyaluran tenaga kerja.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Moch. Fatah pada periode 1998–2003, Fuad Amin yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI dari PKB mulai memainkan peran penting dalam politik Bangkalan. Rozaki (2016; 111) menyebutkan bahwa Fuad Amin memengaruhi anggota DPRD dari PKB untuk menolak laporan pertanggungjawaban bupati sehingga membuka jalan baginya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut, Rozaki (2016; 113) menyebutkan bahwa pada 6 Januari 2003, Fuad Amin yang berpasangan dengan Madong diusung oleh PKB dan PDIP dalam pemilihan Bupati Bangkalan. Pasangan tersebut berhasil memenangkan pemilihan di DPRD Bangkalan dengan memperoleh 42 suara, jauh mengungguli pasangan lawannya yang hanya mendapat tiga suara. Kemenangan tersebut menjadi titik awal menguatnya pengaruh Fuad Amin dalam pemerintahan Bangkalan. Latar belakang Fuad Amin sebagai tokoh agama dan keturunan Bani Kholil membuatnya memiliki legitimasi sosial yang kuat di masyarakat. Posisi tersebut kemudian digunakannya untuk membangun jaringan kekuasaan yang tidak hanya bertahan selama ia menjabat sebagai bupati, tetapi juga terus berlanjut setelah masa jabatannya berakhir.

Menjelang akhir masa jabatannya, Fuad Amin menyiapkan putranya, Fuad Makmun Ibnu Fuad atau yang dikenal sebagai Ra Momon, sebagai penerus. Saat itu, Ra Momon menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan. Setelah terpilih menjadi bupati, terjadi pertukaran posisi antara ayah dan anak. Ra Momon menduduki jabatan Bupati Bangkalan, sedangkan Fuad Amin menjadi Ketua DPRD Bangkalan.

Situasi ini menunjukkan bahwa kekuasaan di Bangkalan tetap berada dalam kendali keluarga Fuad.

Pada akhir tahun 2014, Fuad Amin ditangkap oleh KPK karena terlibat dalam sejumlah kasus, mulai dari suap terkait distribusi gas alam, korupsi, pencucian uang, pemotongan anggaran di SKPD, hingga praktik jual beli jabatan pegawai negeri (Hilda Meilisa, 2019 dalam news.detik.com). Meskipun demikian, pengaruh dinasti Fuad tidak berakhir. Setelah masa jabatan Ra Momon selesai pada 2018, kepemimpinan di Bangkalan kembali dilanjutkan oleh adik Fuad Amin, yaitu Abdul Latif Amin Imron. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Fuad masih memiliki pengaruh politik yang kuat dan tetap dipercaya oleh masyarakat Bangkalan meskipun sebelumnya telah tersangkut berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keluarga Fuad tetap mampu memenangkan kontestasi politik di Bangkalan, meskipun beberapa anggotanya telah terbukti melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pada akhir tahun 2022, Abdul Latif Amin Imron juga ditangkap oleh KPK karena diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dalam kasus tersebut, Abdul Latif diduga meminta sejumlah uang kepada aparatur sipil negara yang mengikuti proses seleksi jabatan, dengan nominal antara Rp50 juta hingga Rp150 juta. Selain itu, ia juga diduga menerima bagian sebesar 10 persen dari berbagai proyek di lingkungan pemerintah daerah. KPK memperkirakan total uang yang diterima mencapai sekitar

Rp5,3 miliar dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk biaya survei elektabilitas (Yusron Fahmi, 2023 dalam liputan6.com).

Terkait penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan dinasti Fuad, Mat Sahet seorang sesepuh Desa Gunilap Kecamatan Sepuluh memberikan tanggapan bahwasannya:

“Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan adalah kesalahan yang dilakukan oleh dinasti Fuad itu sendiri dalam hal pemerintahan, namun dalam hal kepemimpinan menurutnya masyarakat masih mengharapkan pemimpin dari Bani Kholil yang sebenarnya tidak terbatas pada dinasti Fuad saja, kesalahan pemerintahan dinasti Fuad cukup pada kesalahan dua orang tersebut dan bukan berarti kemudian yang lain dipukul rata karena hal tersebut tidaklah elok.”

Lebih lanjut, Mat Sahet memberikan tanggapan mengenai Bani Kholil dalam dinasti politik bahwasannya:

“Bani Kholil sendiri dalam konteks dinasti politik dikarenakan masyarakat Bangkalan memegang teguh hal – hal keagamaan, keagamaan masyarakat Bangkalan pada Bani Kholil disebabkan di pelosok desa – desa banyak lembaga yang merupakan lembaga pendidikan binaan Bani Kholil.”

Kemudian, dalam hal kepemimpinan keluarga Fuad, Mat Sahet menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan keluarga Fuad tidaklah dinasti, karena Fuad terpilih melalui pertarungan murni bahkan hingga dilanjutkan Abdul Latif juga bertarung secara murni dan pada tahapan – tahapannya juga sesuai prosedur sehingga masyarakat masih memegang teguh keagumiannya pada Bani Kholil. Kami percaya bahwasannya masyarakat masih mengharapkan dan percaya pada keluarga Kholil untuk mencalonkan diri pada pemilihan tahun ini, namun apakah daya rekomendasi dari partai tahun ini bukan golongan Bani Kholil.”

B. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai “Bagaimana dinasti Fuad Amin dapat mempertahankan kekuasaannya dalam Pemerintah Kabupaten Bangkalan?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah dan fokus penelitian, yakni pertama menilai bagaimana masyarakat Kabupaten Bangkalan memandang kepemimpinan Dinasti Fuad, termasuk aspek-aspek positif dan negatif dari kepemimpinan tersebut, serta persepsi masyarakat terhadap mereka. Kedua, menginvestigasi dinamika politik lokal, struktur kekuasaan, dan peran institusi dalam mempengaruhi keberlanjutan kepemimpinan Dinasti Fuad.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai kepemimpinan politik dan dinasti lokal, serta memperdalam pemahaman tentang penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks kepemimpinan dinasti di Pemerintah Daerah.
- b. Penelitian ini memperkaya teori kepemimpinan dinasti dengan menganalisis pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan politik terhadap keberlanjutan kekuasaan, serta menawarkan wawasan baru untuk pengembangan teori politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat dan pengambil kebijakan tentang faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap kepemimpinan dinasti dan dampak penyalahgunaan kekuasaan, serta dapat digunakan untuk memperbaiki praktik kepemimpinan.

- b. Temuan penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam reformasi politik dan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan transparan, serta meningkatkan akuntabilitas.
- c. Penelitian ini memberikan panduan bagi calon pemimpin dan partai politik dalam merancang strategi komunikasi dan kampanye untuk membangun dukungan publik yang efektif.





BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan Dinasti Politik Fuad Amin di Kabupaten Bangkalan terbentuk melalui kombinasi kekuatan figur, jaringan kekuasaan, strategi politik, serta penerimaan sosial masyarakat. Fuad Amin berperan sebagai aktor utama yang menjadi pusat kendali kekuasaan, tidak hanya melalui posisi formal yang pernah dipegang, tetapi juga melalui kemampuannya mengendalikan jaringan birokrasi, tokoh agama, elit lokal, dan aparat pemerintahan hingga tingkat desa. Keberlanjutan kekuasaan berlangsung melalui pola yang relatif tetap meskipun terjadi pergantian jabatan formal, di mana pengaruh tetap berjalan melalui anggota keluarga, kelompok pendukung, dan jaringan lama yang dipelihara secara berkelanjutan. Dalam mempertahankan kekuasaan, dinasti memanfaatkan penguatan jaringan sosial-politik, distribusi jabatan dan sumber daya kepada pendukung, pelaksanaan pembangunan fisik sebagai bukti kinerja, serta pendekatan budaya dan keagamaan yang sesuai dengan karakter masyarakat Bangkalan. Dukungan masyarakat pada umumnya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, yaitu selama kepemimpinan mampu menjaga stabilitas dan menghadirkan manfaat nyata melalui pembangunan, meskipun terdapat sebagian pandangan kritis terhadap konsentrasi kekuasaan yang terjadi.
2. Keberadaan dinasti politik memberikan dampak yang bersifat ganda terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di satu sisi, kekuasaan yang terpusat

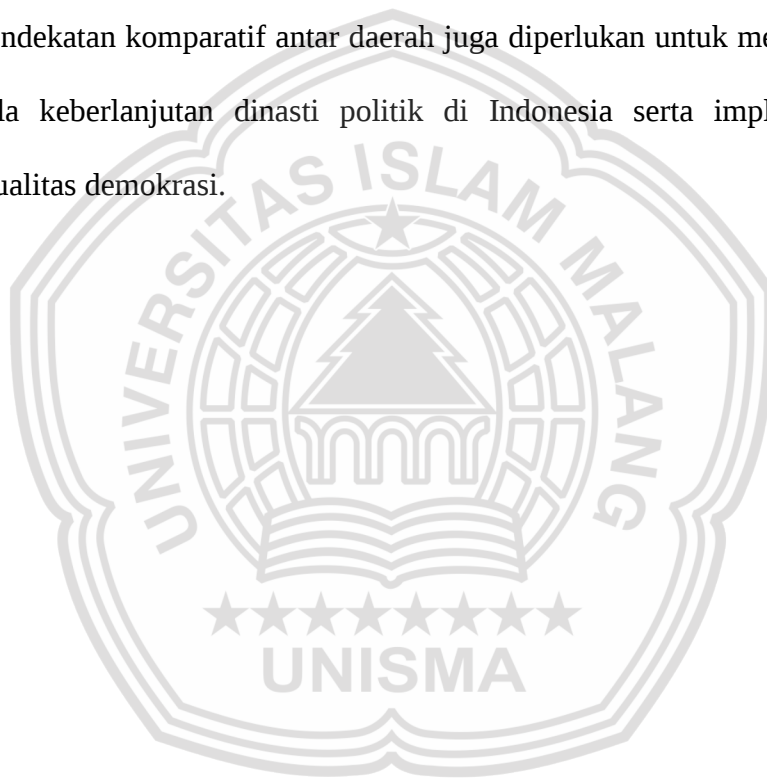
pada satu figur mampu menciptakan stabilitas kebijakan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada figur tertentu sehingga melemahkan peran lembaga dan profesionalitas birokrasi. Dalam konteks demokrasi, dominasi aktor dalam lingkaran dinasti menyebabkan ruang kompetisi politik menjadi kurang terbuka dan membatasi munculnya alternatif kepemimpinan, sementara partisipasi masyarakat cenderung bersifat pragmatis dan berorientasi pada manfaat yang diperoleh. Selain itu, konsentrasi kekuasaan juga berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan karena hubungan yang dibangun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas, sehingga ruang kritik dan kontrol publik menjadi terbatas serta meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Mendorong proses pelebagaan politik lokal yang lebih kuat melalui pembenahan mekanisme rekrutmen politik di partai, penguatan fungsi representasi legislatif, serta peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.
2. Mengarahkan keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pembangunan daerah pada penguatan partisipasi publik yang substantif, bukan hanya sebagai instrumen mobilisasi dukungan politik.

3. Memulai upaya jangka panjang untuk membangun budaya politik yang lebih kritis dan otonom, melalui pendidikan politik yang kontekstual, penguatan ruang diskusi publik, serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu politik, administrasi publik, komunikasi politik, dan studi budaya. Pendekatan komparatif antar daerah juga diperlukan untuk memahami variasi pola keberlanjutan dinasti politik di Indonesia serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrain, C. F. (1992). *Kehidupan politik dan perubahan sosial*. Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political dynasties. *The Review of Economic Studies*, 76(1), 115–142.
- Dahl, R. A. (1978). *Modern political analysis* (3rd ed.). New Delhi, India: Prentice-Hall of India.
- Fletcher, O. K. (Ed.). (1952). *Fundamentals of political science*. New York, NY: Ronald Press Co.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. University of Chicago Press.
- Goodwin, B. (2003). *Using political ideas* (4th ed.). West Sussex, England: Barbara Goodwin.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Grindle, M. S. (2007). *Going local: Decentralization, democratization, and the promise of good governance*. Princeton University Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia*. Stanford University Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57.
- Hague, R., Harrop, M., & Breslin, S. (1998). *Comparative government and politics* (4th ed.). London, England: Macmillan Press.
- Haryanto. (2017). *Elit, massa, dan kekuasaan: Suatu bahasan pengantar*. Yogyakarta, Indonesia: PolGov.
- Heywood, A. (1997). *Politics*. London, England: Macmillan Press.
- Huntington, S. P. (1968). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Jainuri, Sulistyaningsih, T., & Salahudin. (2014). *Catatan politik ditahun politik*. Yogyakarta: Buku Litera dan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: McGrawHill.
- Lasswell, H. D. (1948). *The structure and function of communication in society*. In L. Bryson (Ed.), *The communication of ideas* (pp. 37–51). Harper & Row.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and society*. New Haven, CT: Yale University Press.

- Leftwich, A. (2000). *States of development: On the primacy of politics in development*. Polity Press.
- Machiavelli, N. (2003). *The discourses*. Jogjakarta, Indonesia: Bentang Budaya.
- Machiavelli, N. (2008). *The prince*. Surabaya, Indonesia: Selasar Publishing.
- Mas'oed, M., & Nasikun. (1987). *Sosiologi politik*. Yogyakarta, Indonesia: PAU-Sosial UGM.
- Merkel, P. H. (1967). *Continuity and change*. New York, NY: Harper and Row.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Miles, Huberman, Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edition 3. (Arizona State University)
- Mosca, G. (1939). *The ruling class*. McGraw-Hill.
- Noer, D. (1965). *Pengantar ke pemikiran politik*. Medan, Indonesia: Dwipa.
- Noor, H. Z. Z. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi: tahun 2015*. Deepublish.
- Nordholt, H. S. (2013). *Oligarchy and democracy in Indonesia*. Cornell University Press.
- Nordholt, H. S. (2014). *Democratization in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Pareto, V. (1968). *The rise and fall of elites: An application of theoretical sociology*. Bedminster Press.
- Robison, R. (2012). *Soeharto dan bangkitnya kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Robson, W. A. (1954). *The university teaching of social sciences: Political science (Teaching in the Social Sciences)*. Paris, France: UNESCO.
- Rozaki, A. (2016). *Islam, oligarki politik, dan perlawanan sosial*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta, Indonesia: Grasindo.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yatim, B. (1997). *Sejarah peradaban Islam Dirasah Islamiah II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Artikel & Jurnal:

- Choi, E. (2011). *Patronage and dynastic politics in local democracies*. Asian Journal of Political Science, 19(2), 135–156.
<https://doi.org/10.1080/02185377.2011.568573>
- Dona, F. (2022). *Dinasti politik di era otonomi daerah dalam perspektif demokrasi*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 7(2).
<https://doi.org/10.22515/alakhkam.v7i2.6254>

- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14, 289–310.
<https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508>
<https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2008.00519.x>
- Jalalzai, F., & Rincker, M. (2018). Blood is thicker than water: Family ties to political power worldwide. *Historical Social Research*, 43(4), 54-72.
<https://doi.org/10.12759/hsr.43.2018.4.54-72>
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, clients, and policies: Patterns of democratic accountability and political competition*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511585869>
- Querubin, P. (2016). Family and politics: Dynastic persistence in the Philippines. *Quarterly Journal of Economics*, 131(1), 1–48.
<https://doi.org/10.1093/qje/qjv040>
- Querubin, P. (2016). Family and politics: Dynastic persistence in the Philippines. *Quarterly Journal of Economics*, 131(1), 1–48.
<https://doi.org/10.1093/qje/qjv040>
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113.
<https://doi.org/10.2307/1959280>
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113.
<https://doi.org/10.2307/1959280>
- Weatherford, M. S. (1992). Measuring political legitimacy. *American Political Science Review*, 86(1), 149–166. <https://doi.org/10.2307/1964021>
- Weatherford, M. S. (1992). Measuring political legitimacy. *American Political Science Review*, 86(1), 149–166. <https://doi.org/10.2307/1964021>
- Yusoff, M. A. (2018). Political dynasties and democratic consolidation in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(2), 99–121.
<https://doi.org/10.1177/186810341803700205>
- Yusoff, M. A. (2018). Political dynasties and democratic consolidation in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(2), 99–121.
<https://doi.org/10.1177/186810341803700205>

Undang – Undang:

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 18, 18A, & 18B.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Skripsi:

- Imam, I. (2022). *Pengaruh dinasti politik terhadap penerapan prinsip good governance di Kota Subulussalam* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mawardi, F. I. (2021). *Analisis pola terbentuknya dinasti politik kepala daerah di Kabupaten Bogor* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurcholis, A. (2016). *Orang kuat dalam dinamika politik lokal: Studi kasus kekuasaan politik Fuad Amin di Bangkalan* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putri, H. P. (2023). *Analisis yuridis politik dinasti di Indonesia (Studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sumber Lainnya:

- Editorial. (2023, November 2). The Guardian view on South-East Asian dynasties: Political leaders are keeping it in the family. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/nov/02/the-guardian-view-on-south-east-asian-dynasties-political-leaders-are-keeping-it-in-the-family>
- Fahmi, Y. (2023, August 15). Selain vonis penjara 9 tahun, hak dipilih eks Bupati Bangkalan Latif Amin Imron dicabut 5 tahun. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5377668/selain-vonis-penjara-9-tahun-hak-dipilih-eks-bupati-bangkalan-latif-amin-imron-dicabut-5-tahun>
- Meilisa, H. (2019, September 16). Rekam jejak Fuad Amin eks Bupati Bangkalan sebelum meninggal dunia. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4709166/rekam-jejak-fuad-amin-eks-bupati-bangkalan-sebelum-meninggal-dunia>

